

Pilar Kekuasaan Turki Utsmani: Dinamika Administrasi dan Pemerintahan yang Cemerlang

**Najjana Hamim Ar-Rafi¹, Mahmud Ibnu Rossy², Muhammad Dava
Virmansyah³, Sahal Ahmad⁴, Faiz Fikri Al Fahmi⁵**

¹²³⁴⁵Universitas Islam Syekh-Yusuf

2303020060@student.unis.ac.id¹

ABSTRACT

Ottoman Turkiye was one of the strongest empires in history, which reached the peak of glory thanks to a brilliant system of government and administration. This article examines the dynamics of administration and governance of the Ottoman Turkish government which became the foundation of its power for more than six centuries. The main focus of this research is the analysis of bureaucratic structure, the central role of the Sultan, the function of the Imperial Council (Divan), and the integration of Islamic law in the political and social system. In addition, this article reviews the Jenissari-based military system and management of conquered territories that contributed to the stability of the empire. A multidisciplinary approach is used to highlight the relationship between government policies and the socio-economic dynamics of Ottoman Turkish society. The research results show that the success of the empire did not only lie in military strength, but also in administrative efficiency that was adaptive to the challenges of the times. By highlighting this administrative legacy, this article offers a new perspective for the study of modern governance, including the values of justice, sustainability and inclusiveness that are still relevant today. This study aims to enrich the literature on Islamic history and inspire governance approaches in the contemporary era.

Keywords: Ottoman Turkiye; government system; administration system

ABSTRAK

Turki Utsmani adalah salah satu kekaisaran terkuat dalam sejarah, yang mencapai puncak kejayaan berkat sistem pemerintahan dan administrasi yang cemerlang. Artikel ini mengkaji dinamika administrasi dan tata kelola pemerintahan Turki Utsmani yang menjadi fondasi kekuasaannya selama lebih dari enam abad. Fokus utama penelitian ini adalah analisis struktur birokrasi, peran sentral Sultan, fungsi Dewan Kekaisaran (Divan), serta integrasi hukum Islam dalam sistem politik dan sosial. Selain itu, artikel ini mengulas sistem militer berbasis jenissari dan pengelolaan wilayah taklukan yang berkontribusi pada stabilitas kekaisaran. Pendekatan multidisiplin digunakan untuk menyoroti hubungan antara kebijakan pemerintahan dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat Turki Utsmani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kekaisaran tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada efisiensi administrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan menyoroti warisan administratif ini, artikel ini menawarkan perspektif baru bagi pembelajaran tata kelola modern, termasuk nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas yang masih relevan hingga kini. Studi ini bertujuan memperkaya literatur tentang sejarah Islam dan menginspirasi pendekatan tata kelola di era kontemporer.

Kata kunci: Turki Utsmani; sistem pemerintahan; sistem administrasi

PENDAHULUAN

Dinasti Turki Utsmani didirikan pada tahun 1300 M (Lazim, 2020), tepatnya pada abad pertengahan setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol (Yulianti, 2023). Berdasarkan etnis Oghus, kelompok kecil dari keluarga Qabey yang berasal dari wilayah Turkistan dan merupakan komponen suku Al-Ghas Al-Turki, dinasti ini berkembang sebagai kekuatan baru setelah Fatimiyah, Seljuq, Ayyubiyah, dan Mamluk (Hasnahwati, 2020). Kekaisaran Ottoman, salah satu peradaban terbesar dalam sejarah, terkenal dengan struktur administratif dan pemerintahannya yang kreatif, selain pencapaian politik dan militernya. Wilayah yang beragam secara geografis, etnis, budaya, dan agama berhasil dimasukkan ke dalam entitas pemerintahan yang stabil oleh kekaisaran. Pencapaian ini dimungkinkan oleh kombinasi kekuatan militer dan kerangka administratif yang seimbang yang secara efektif mengelola keberagaman dengan menggabungkan otonomi daerah dengan kewenangan pusat. Kontribusi signifikannya dalam memupuk keharmonisan dan stabilitas keberagaman ditunjukkan oleh sejarah panjangnya di seluruh dunia (Fauziah et al., 2024).

Sejak tahun 923 H hingga 1342 H (1517-1923 M), Kesultanan Utsmaniyah terkenal karena kemampuannya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, khususnya di Eropa Timur. Seiring dengan kemenangannya dalam penaklukan Hongaria, Beograd, Albania, Yunani, Rumania, Serbia, dan Bulgaria, mereka juga memperluas wilayahnya ke bagian timur dunia Islam. Penaklukan ibu kota Kekaisaran Romawi, Konstantinopel, yang melambungkan kemegahan pemerintahan Ottoman, adalah salah satu kemenangan terbesarnya (Siregar et al., 2022). Namun pada akhirnya, penanaman ide-ide nasionalis oleh penjajah merusak persatuan umat Islam, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan dan perpecahan tanah-tanah Islam menjadi negara-negara kecil dan miskin. Untuk membangun sistem yang khas, keberhasilan awal kekaisaran tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya tetapi juga pada kapasitasnya untuk menyerap dan mengubah kebiasaan administratif masyarakat sebelumnya, termasuk Bizantium, Persia, dan dunia Islam (Putri et al., 2021). Untuk menjaga stabilitas politik dan menghormati keragaman agama dan budaya, sistem ini memunculkan inovasi seperti dewan administrasi Divan, militer Janissari, dan penerapan hukum Kanun, yang melengkapi Syariah. Pencapaian ini merupakan bukti kerangka kerja pemerintahan yang kuat dan mudah beradaptasi sehingga berhasil menggabungkan keberagaman ke dalam satu kesatuan politik yang stabil (Rahman, 2018).

Di balik sistem pemerintahan Turki Utsmani yang kompleks, terdapat dinamika antara upaya sentralisasi dan desentralisasi. Elit administratif seperti wazir agung, pasha, dan gubernur provinsi harus berbagi wewenang dengan sultan, yang merupakan penguasa absolut. Memahami interaksi antara daerah dan pusat sangat penting untuk memahami bagaimana kerajaan ini mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama meskipun menghadapi kesulitan internal dan eksternal. Institusi seperti militer, pendidikan, dan wakaf juga membantu pembangunan sosio-ekonomi dan stabilitas politik kekaisaran.

Kajian ini mengkaji aspek politik, ekonomi, dan sosial dari sistem pemerintahan Turki Utsmaniyah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenainya. Proses yang mempengaruhi struktur administratif, seperti interaksi antara otoritas daerah dan pusat serta inovasi yang dihasilkan dari perpaduan berbagai tradisi dibahas dalam kajian ini. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bagaimana sistem pemerintahan Turki Utsmaniyah menjadi landasan kekuasaan yang pada masanya mampu mengendalikan keberagaman, membangun stabilitas politik, dan seperti telah disebutkan sebelumnya, membantu menyukseskan perluasan wilayah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kualitatif berbasis literatur yang relevan dengan kajian berjudul "Pilar Kekuasaan Turki Utsmani: Dinamika Administrasi dan Pemerintahan yang Cemerlang". Metode ini bertujuan untuk mengungkap dinamika administrasi dan pemerintahan Turki Utsmani melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi bahan-bahan historis yang otentik dan kredibel.

Langkah awal penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data dengan tinjauan pustaka yang sistematis, mencakup berbagai sumber primer dan sekunder seperti dokumen resmi, manuskrip, buku sejarah, artikel ilmiah, serta makalah akademik yang membahas sistem administrasi dan pemerintahan Turki Utsmani. Peneliti memastikan sumber-sumber tersebut memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian guna membangun kerangka historis yang kokoh (Adlini et al., 2022).

Tahap berikutnya adalah analisis data. Teknik deskriptif digunakan untuk memahami dinamika pemerintahan dan administrasi Turki Utsmani secara menyeluruh. Peneliti mengidentifikasi konteks sejarah, pola kekuasaan, serta hubungan antara struktur administrasi dan keberhasilan pemerintahan yang tercermin dalam dokumen-dokumen historis (Jannah, 2019). Analisis dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi dinamika kekuasaan Turki Utsmani.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pilar-pilar kekuasaan Turki Utsmani. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengkajian sejarah pemerintahan Islam, khususnya dalam konteks administrasi dan tata kelola negara yang cemerlang pada masa Turki Utsmani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula dan Ekspansi Wilayah Pemerintahan Turki Utsmani

Salah satu tanah yang pertama kali diperoleh akibat tumbuhnya Dinasti Seljuk dan migrasi masyarakat Turki ke arah barat di seluruh Anatolia adalah negara Turki. Ada wilayah lain yang seolah-olah mengakui kedaulatan Seljuk tetapi secara *de facto* merupakan wilayah otonom yang bermunculan di sepanjang wilayah perbatasan yang disengketakan oleh Imperium Byzantium. Wilayah ini terletak dekat Byzantium

di barat laut Anatolia. Daerah ini memiliki sejumlah besar lahan pertanian yang produktif dan luas serta kota-kota pasar, beberapa di antaranya merupakan perhentian penting di sepanjang jalur perdagangan yang menghubungkan Iran dan Asia ke Mediterania (Hourani & Abubakar, 2004).

Menyusul jatuhnya berbagai kerajaan Islam sebelumnya, termasuk Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Seljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk, Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan terbesar. Di Eropa Timur, Turki Utsmani berhasil menjadi kekuatan Islam yang bertahan selama berabad-abad. Osman Bey mendirikan Turki Utsmani sebagai emirat kecil pada tahun 1299, berpusat di wilayah Söğüt dan Bilecik di Anatolia barat. Akibat tekanan invasi Mongol dan jatuhnya Kerajaan Seljuk, iklim politik di wilayah Anatolia saat itu tidak stabil. Dengan secara strategis menyerang wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium yang lebih lemah, Osman Bey menggunakan kekosongan kekuasaan ini untuk meletakkan dasar bagi kekaisaran tersebut. Pengaruh Osman dan penerusnya tumbuh dengan cepat berkat taktik militer yang cerdas dan kepemimpinan karismatik mereka.

Menaklukkan wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan Semenanjung Balkan, penerus Osman, termasuk Orhan dan Murad I, melanjutkan ekspansi mereka. Dengan menggunakan prajurit elit seperti *Janissari*, yang merupakan inti militer dari Turki Utsmani, Orhan meletakkan dasar bagi pemerintahan yang lebih terorganisir. Ketika Murad I memperluas kekuasaannya ke Eropa Timur pada abad keempat belas, Balkan menjadi komponen penting kekaisaran. Sementara itu, Paus menghasut konflik dengan sekutu Eropa lainnya di bawah komando Raja Sijisman dari Hongaria. Tentara sekutu Kristen Eropa dihancurkan oleh Sultan Bayazid yang menggantikan Murad I. Struktur administratif yang efisien, seperti pemisahan divisi administratif dan penunjukan gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada pusat kekuasaan Istanbul, memungkinkan terjadinya penaklukan ini. Bagi umat Islam, kejadian ini merupakan catatan sejarah yang sangat patut dicatat.

Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai "Sang Penakluk", pada tahun 1453 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah. Selain mengakhiri Kekaisaran Bizantium, penaklukan ini memperkuat dominasi Turki Utsmani atas jalur perdagangan utama yang menghubungkan Timur dan Barat. Mehmed II mendirikan Konstantinopel, yang saat itu dikenal sebagai Istanbul, ibu kota kekaisaran dan fokus kekuatan politik, ekonomi, dan budaya di dunia Islam. Kota ini mewakili kehebatan pemerintahan Ottoman dan awal dari pemerintahan yang berfungsi dengan baik.

Selama abad ke-16, Turki Utsmani berada pada masa paling makmur di bawah Sultan Sulaiman I. Anatolia, Semenanjung Balkan, Timur Tengah, Mesir, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Timur termasuk di antara wilayah kekuasaan kekaisaran. Turki Utsmani menjadi kekuatan militer utama dan pusat perdagangan dan kebudayaan di seluruh dunia berkat kendali mereka atas Laut Mediterania dan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Seperti yang telah dibahas dalam artikel sebelumnya, penggabungan hukum Islam dengan kebijakan

sipil, administrasi yang efektif, dan sistem pemerintahan terpusat semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan pertumbuhan ini.

Pengamatan terhadap proses pembentukan dan pengembangan wilayah ini menunjukkan bahwa keberhasilan Turki Utsmani didasarkan pada kehebatan militer dan kemampuan struktur administrasi mereka untuk berubah seiring waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya keterkaitan yang erat antara strategi pemerintah, stabilitas internal, dan kemampuan mengelola keragaman budaya di wilayahnya, sebagaimana dibahas dalam ulasan artikel utama mengenai sistem administrasi. Dengan kata lain, seperti yang ditunjukkan pada masa kejayaan Sulaiman Agung, perjalanan ekspansi awal ini menjadi landasan bagi aparat pemerintah yang kuat dan terorganisir dengan baik (Abd Rahman, 2014).

Sistem Administrasi dan Pemerintahan Turki Utsmani

Sistem pemerintahan Turki Utsmani adalah salah satu model pemerintahan yang paling kompleks dan terorganisir pada masanya. Secara komprehensif pemerintahan Turki Utsmaniyah terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah (Abd Rahman, 2014). Pemerintahan pusat dipimpin oleh Sultan sebagai otoritas tertinggi, peran sultan sebagai pemimpin karismatik juga ditopang oleh legitimasi agama, yang diperoleh melalui dukungan ulama dan penguasa hukum syariat. Selain itu Sultan didukung oleh wazir agung dan dewan yang disebut *Divan*, yang bertugas mengatur kebijakan nasional dan mengelola berbagai aspek negara, termasuk militer, keuangan, dan hukum. Pemerintahan daerah dikelola oleh gubernur atau *beylerbeyi*, yang mempunyai wewenang atas provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang berada di bawah pengawasan *kadi* (hakim) dan pejabat daerah lainnya memastikan terlaksananya hukum syariah dan peraturan negara di tingkat masyarakat.

Pada abad ke-16 dan 17, Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang dikenal dengan kebijakan hukum yang adil dan sistem pemerintahan yang efektif. Dengan wilayah yang luas dan beragam yang mencakup sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika, Turki Ottoman menjadi terkenal selama periode ini dan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Dengan pembagian wewenang yang hierarkis antara ibu kota, distrik, dan daerah, sistem Utsmaniyah berperan penting dalam pengelolaan kerajaan besar ini. Konstantinopel, ibu kotanya, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, menyatukan beragam bahasa, budaya, dan agama di bawah kerangka terpadu.

Efektivitas sistem administrasi yang diterapkan tidak dapat dipisahkan dari pencapaian ini. Sultan dan dewan *Divan* mempunyai kewenangan langsung atas pemerintahan pusat, yang bertugas mengelola daerah dan melaksanakan kebijakan. Untuk menjaga kesetiaan setiap daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan daerah diberi wewenang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam

menghadapi keragaman. Meskipun wilayahnya luas dan beragam, perpaduan ini menghasilkan sistem pemerintahan yang terpadu (Nofrianti & Muslim, 2019).

Dalam sistem pemerintahan ini, Turki Utsmani didirikan di Mesir dengan memperkuat pasukan *Jenissari* dan menempatkan beberapa komandan militer dan gubernur pada tempatnya, sehingga dia bisa memusatkan kekuasaan memastikan kesinambungan di dalamnya penagihan untuk penyediaan pajak perbendaharaan Istanbul (Rohayati, 2015). Inovasi teknologi persenjataan dan strategi perang menjadi faktor penting dalam perluasan wilayah hingga ke Eropa, Asia, dan Afrika. Harmoni antara pemerintahan terpusat dan manajemen militer yang efisien membuat Turki Ottoman mampu mempertahankan kekuasaan yang stabil selama berabad-abad. Model ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kekuatan militer dengan pengelolaan pemerintahan yang sistematis, mencerminkan kematangan pengelolaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam sejarah pemerintahan Islam.

Namun, indikasi kemunduran mulai terlihat pada abad ke-18. Korupsi dan kemerosotan sistem militer, yang pernah menjadi fondasi kekaisaran, merupakan masalah internal pemerintahan yang dulunya dominan. Situasi ini diperburuk oleh kekuatan luar, seperti persaingan dari negara-negara Eropa yang lebih maju. Meskipun inisiatif modernisasi abad ke-19, seperti Tanzimat, berupaya mempertahankan kesultanan, perselisihan internal dan kekalahan militer akhirnya menyebabkan Kesultanan Utsmaniyah bubar pada awal abad ke-20.

Selain berperan sebagai penghubung antara Timur dan Barat selama hampir enam abad, Turki Ottoman, dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya, menunjukkan bagaimana struktur administrasi yang efektif dapat mempertahankan kemegahan sebuah kerajaan. Kemunduran ini menjadi pengingat penting bahwa pemerintah harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sistem Administrasi dan Pemerintahan

Keberhasilan sistem administrasi dan pemerintahan Turki Utsmani didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kepemimpinan yang Kuat

Khususnya pada tahun-tahun awal mereka, para pemimpin Turki Utsmani terkenal karena keberanian, kegigihan, dan kecakapan militer mereka yang luar biasa. Elemen kunci dalam membangun stabilitas administratif dan politik adalah kepemimpinan mereka. Sebagai pemimpin puncak, Sultan menjalankan pemerintahan dengan penuh tekad, yang menjamin tidak hanya keberlangsungan kekuasaan namun juga kesetiaan seluruh lapisan masyarakat. Sifat ini memungkinkan kerajaan untuk menangani masalah internal dan eksternal sambil mengelola wilayah yang luas (Zulfikar, 2018).

2. Sistem Pemerintahan yang Terorganisasi

Ada hierarki yang berbeda dalam sistem pemerintahan Turki Utsmani. Dengan bantuan perdana menteri, atau *shadr al-a'zham*, yang bertugas mengatur

pemerintahan, sultan memegang posisi otoritas tertinggi. Seorang *pasya* atau gubernur mengawasi wilayah tingkat pertama di bawah perdana menteri, sedangkan walikota atau bupati bertanggung jawab di tingkat kotamadya. Penanganan wilayah yang sangat luas dapat dilakukan secara efektif jika jaringan pemerintah terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Landasan bagi kekuasaan administratif terpadu disediakan oleh sistem ini (Rahmawati, 2017).

3. Perombakan dan Inovasi Militer

Salah satu penguasa Turki Utsmani, *Orkhan*, melakukan penyesuaian signifikan terhadap angkatan bersenjata kerajaan. Dia merekrut orang-orang non-Turki ke militer dan bahkan melatih anak-anak Kristen untuk bertugas di pesantren. Tindakan ini menghasilkan satuan militer baru yang dikenal dengan nama Janissari (Inkisyariah), yang dianggap sebagai tentara yang sangat disiplin dan elit. Berkat efektivitas penemuan ini, militer Ottoman mampu memperluas wilayahnya secara signifikan dan menjadi mesin perang yang sangat ampuh. Selanjutnya, pertumbuhan maritim kerajaan mencapai puncaknya pada abad ke-16 berkat pembangunan angkatan laut yang cukup besar (Nofrianti & Muslim, 2019).

4. Hukum yang Tertata

Kerajaan ini berhasil menerbitkan buku hukum yang dikenal dengan nama *Multaqa al-Abhur* pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I. Sebelum reformasi abad ke-19, buku ini menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan pemerintahan kerajaan. Stabilitas sosial dan politik akan terjamin bila hukum diterapkan secara konsisten dan sistematis, sehingga dapat menumbuhkan kepastian hukum dalam masyarakat. Sultan Sulaiman I diberi gelar "al-Qanuni", yang berarti "pembuat hukum", sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang hukum. Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya supremasi hukum bagi keberhasilan sistem pemerintahan kerajaan (Ratnasari, 2013).

Faktor Kemunduran Sistem Administrasi dan Pemerintahan

1. Kelemahan Para Sultan dan Sistem Birokrasi

Kekuasaan dan kompetensi seorang sultan dalam mengatur birokrasi sangat penting dalam struktur pemerintahan Turki Utsmani. Mengontrol pemerintahan menjadi tantangan ketika kepemimpinan Sultan memburuk, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Salim II dan penerusnya tidak memiliki karakter moral dan keterampilan kepemimpinan yang baik, sehingga melemahkan pemerintahan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketergantungan yang besar pada keterampilan pribadi sultan berubah menjadi titik lemah yang mempercepat kejatuhan pemerintahan dan pemerintahan (Uliyah, 2021).

2. Kemerostan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Stabilitas pemerintahan kerajaan juga terkena dampak memburuknya kualitas perekonomian. Situasi ekonomi kerajaan memburuk akibat ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan perdagangan global. Turki Utsmani tidak dapat mengadopsi struktur ekonomi modern yang telah berhasil dibangun oleh Eropa, yang berfokus pada tujuan domestik dan internasional. Kesulitan keuangan jangka panjang

mempersulit monarki untuk mendukung angkatan bersenjata dan pemerintahannya, yang pada akhirnya membuat tata kelola negara menjadi lebih lemah.

3. Pemberontakan Wilayah Kekuasaan

Berkurangnya kewenangan terpusat atas wilayah kewenangan merupakan indikasi lain dari kemunduran administratif. Sejumlah wilayah mulai memberontak dalam upaya melepaskan diri dari kerajaan, yang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah pusat menjaga perdamaian dan kesetiaan wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Dominasi administratif dan geografis Turki Utsmani semakin dilemahkan oleh kelompok separatis ini (Jannah, 2019).

4. Munculnya Kekuatan Baru di Eropa

Salah satu kekuatan luar yang mempercepat jatuhnya pemerintahan Turki Utsmani adalah iklim politik di Eropa. Negara-negara Eropa mulai mengumpulkan kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi untuk mengendalikan geopolitik global sementara kerajaan-kerajaan tersebut sibuk menyelesaikan masalah-masalah internal. Seperti yang terlihat dalam Perjanjian tahun 1774 M antara Sultan Abdul Hamid dan Rusia, yang memaksa kerajaan tersebut menyerahkan benteng dan tanah penting, Eropa mengeksploitasi kesenjangan yang diciptakan oleh kelemahan internal Turki Utsmani.

5. Ketidakmampuan Menangani Modernisasi

Di penghujung era Turki Utsmani, muncul gerakan modernisasi yang menunjukkan ketidakmampuan kerajaan tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun pada akhirnya dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, inisiatif modernisasi seperti transisi kerajaan-ke-republik mengungkap kelemahan sistem sebelumnya, yang tidak dapat memenuhi tuntutan pemerintahan kontemporer. Perubahan ini menunjukkan betapa ketinggalan zamannya sistem ini mengingat isu-isu kontemporer (Basri et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kerajaan Islam terbesar, Turki Ottoman memiliki sejarah yang luar biasa dalam hal administrasi, kekuatan militer, dan manajemen keanekaragaman. Di bawah kepemimpinan Osman Bey, dinasti ini didirikan pada tahun 1300 M sebagai sebuah emirat kecil di Anatolia yang akhirnya tumbuh menjadi sebuah kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Eropa, Asia, dan Afrika. Kepemimpinan yang kuat, struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, taktik militer yang inovatif, dan undang-undang yang terorganisir dengan baik semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan perluasan wilayahnya. Titik balik penting dalam sejarah Turki Ottoman adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, yang menjadikan kota ini sebagai pusat politik, perdagangan, dan budaya Islam.

Melalui struktur pemerintahan terpusat sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintahan dan sistem pemerintahan Turki Utsmani terbukti efektif dalam mengelola berbagai domain. Hal ini memungkinkan terciptanya perdamaian sosial dan stabilitas politik dalam menghadapi keberagaman agama, budaya, dan etnis. Selain Syariah, lembaga-lembaga seperti *Divan*, militer

Janissari, dan hukum *Kanun* berkembang menjadi kemajuan yang signifikan dalam pemerintahan.

Namun kemunduran dinasti ini disebabkan oleh beberapa keadaan. Kesultanan ini dilemahkan oleh isu-isu seperti kelemahan para sultan, korupsi birokrasi, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, kehancuran Turki Ottoman dipercepat oleh pemberontakan regional dan tekanan dari negara-negara Eropa yang lebih kuat.

Kesultanan Turki Utsmani meninggalkan warisan penting dalam sejarah pemerintahan Islam, meskipun mereka akhirnya mengalami kehancuran pada awal abad ke-20. Pencapaian ini menunjukkan perlunya kekuatan militer untuk memiliki kerangka administratif yang efisien dan kapasitas untuk menangani keberagaman. Namun kegagalan ini menjadi pengingat penting bahwa agar pemerintah besar tetap berkuasa, mereka harus mampu berubah seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, R. (2014). Turki dalam Pencarian Bentuk Pemerintahan (Sebuah Catatan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 2(01), 71–83. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v2i01.1344>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Basri, M., Sagala, P. H., Nasution, A. K. B., & Mahfudza, A. (2023). Dampak kemunduran Kerajaan Turki Usmani terhadap pendidikan. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i1.764>
- Fauziah, N., Sirojudin, R., Faturachman, N., Wasehudin, W., & Lazzavietamsi, F. A. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Islam di Era Turki Utsmani. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan Islam*, 8(2), 349–364. <https://doi.org/10.69552/tarbiyatuna.v8i2.2584>
- Hasnahwati, H. (2020). Pendidikan Islam Di Masa Turki Usmani. *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan*, 3(2), 13–22. <https://doi.org/10.35914/jad.v3i2.447>
- Hourani, A., & Abubakar, I. (2004). *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*. Mizan Media Utama.
- Jannah, M. (2019). Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924. *MASA: Journal of History*, 1(1). <https://doi.org/10.31571/masa.v1i1.1521>
- Lazim, A. (2020). Sistem Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan. *TABYIN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v2i2.130>
- Nofrianti, M., & Muslim, K. L. (2019). Kemajuan Islam pada Masa Kekaisaran Turki Utsmani. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 22–32. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1331>
- Putri, R., Daulay, P., & Dahlan, Z. (2021). *Warisan Peradaban Islam Era Turki Utsmani sebagai Penguat Identitas Turki Modern*.
- Rahman, F. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Turki. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 289–308. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.74>

- Rahmawati, R. K. (2017). Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah 'Utsmaniyah (1876-1909 M). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(1), 193-211.
- Ratnasari, D. (2013). Sulaiman Al-Qanuni: Sultan Terbesar Kerajaan Turki Usmani. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 14(1), 70-87.
- Rohayati, T. (2015). Kebijakan Politik Turki Utsmani di Hijaz 1512-1566 M. *Al Turas*, 21(2).
- Siregar, A. A., Damanik, D. A., Safitri, E., & Tanjung, I. H. (2022). Periode Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-Cirinya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 5405-5410. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9137>
- Uliyah, T. (2021). Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan Dan Kemundurannya. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(02), 324-333.
- Yulianti, M. Q. (2023). Dinasty Turki Utsmani dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Peradaban Islam pada Masanya. *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan Dan Sosial Masyarakat*, 7(1).
- Zulfikar, A. (2018). Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah). *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6(1), 87-106. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v6i1.5459>